

BAB I

PENDAHULUAN

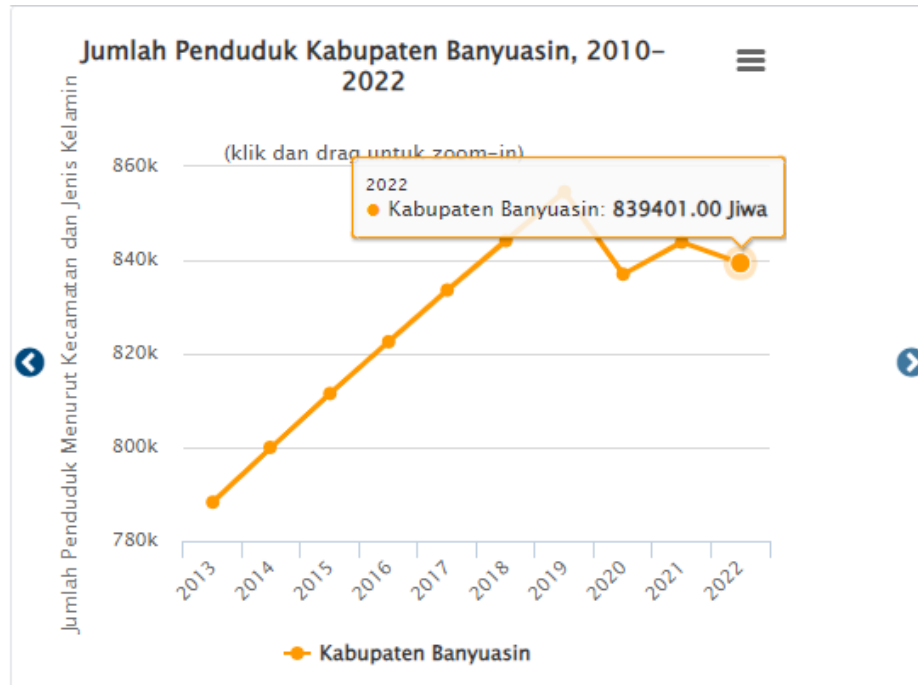
1.1 Latar Belakang

Indonesia berada di nomor empat selaku negara dengan populasinya paling besar di global, dengan tingkat perkembangan penduduknya yang tergolong tinggi. Pada tahun 2019, angka penduduk Indonesia tercatat menyentuh 266,91 juta jiwa (Statistik, 2019). Pertumbuhan populasi adalah proses yang berubah-ubah yang menggambarkan perubahan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu untuk tujuan perbandingan. Mantra (2000) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat sering kali terganggu oleh kenyataan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk cenderung lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan produksi pangan.

Pertumbuhan populasi terjadi di berbagai belahan dunia, meskipun tingkat pertumbuhannya bervariasi. Di Indonesia, jumlah penduduk terus bertambah dengan cepat, menyebabkan peningkatan signifikan setiap tahunnya (Ariefa & Woyanti, 2014).

Salah satu tantangan demografi terjadi di Kabupaten Banyuasin, yaitu tingginya laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran, serta ketidakmerataan distribusi penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin mencapai sekitar 840.000 jiwa.

Gambar 1.1 Data Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuasin



Sumber: Badan Pusat Statistik

Guna mengatasi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pemerintah meluncurkan program Keluarga Berencana (KB) (Tatuhe, Laloma, & Pesoth, 2016). Program ini sudah muncul sejak tahun 1970 di era pemerintahan Soeharto (Mayrudin, 2018) dan termasuk dalam prioritas dalam kebijakan kependudukan di Indonesia. Tujuan program KB adalah membantu keluarga mengatur jumlah anak, mempertimbangkan selang waktu antar kelahiran, serta menciptakan keadaan keluarga yang lebih sejahtera di luar adanya tekanan. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat mewujudkan hidup yang lebih adil, makmur, dan tentram (Widanti & Lucyati, 2016).

Program KB tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan, tetapi juga laki-laki. Terdapat dua kategori metode pencegahan kehamilan berdasarkan durasinya, yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan metode kontrasepsi non Jangka Panjang.

Program Keluarga Berencana Nasional telah sukses mendorong masyarakat guna memiliki keluarga kecil yang lebih mandiri. Meski demikian, keberhasilan ini masih perlu diperkuat dan perluasan jangkauannya, mengingat belum semua daerah mencapai target yang sama. Termasuk tolak ukur keberhasilan program KB adalah banyaknya penggunaan alat kontrasepsi oleh pasangan usia subur. Namun, pemanfaatan MKJP masih perlu ditingkatkan (Manurung, 2012).

UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya strategis untuk menentukan interval kelahiran optimal, serta mendukung kesehatan reproduksi. Tujuan utama KB adalah membangun keluarga yang bermutu dan makmur (Direktorat Kesehatan Keluarga dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Edukasi kesehatan soal pencegahan kehamilan dapat menambah informasi yang memengaruhi persepsi dan dorongan seseorang saat pemilihan cara pencegahan kehamilan. Edukasi tentang kesehatan tersebut mencakup informasi soal pencegahan kehamilan, manfaatnya, jenis-jenisnya, keunggulannya, persentase kegagalan, komplikasi, dan tarif dari masing-masing tipe pencegahan kehamilan (Mayasari, Ayu Citra., Budiarti, Astrida., Enggar, 2017).

Salah satu cara agar dapat mengurangi peningkatan jumlah kelahiran ialah meningkatkan penggunaan metode pencegahan kehamilan. Tingkat penggunaan kontrasepsi memengaruhi penurunan total angka kelahiran atau yang biasa disebut *Total Fertility Rate* (TFR).

Pemilihan metode kontrasepsi adalah keputusan penting bagi setiap akseptor KB. Tujuan utamanya adalah menunda atau membatasi kehamilan, sehingga sangat penting bagi akseptor agar dapat memilih metode yang efektif guna menghindari kehamilan yang tidak direncanakan. Oleh karena itu, setiap individu harus mempertimbangkan dengan matang pilihan metode kontrasepsi, terutama ketika beralih dari satu metode ke metode lain (Amran et al., 2023). Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah solusi pencegahan kehamilan yang dirancang untuk mengantisipasi fertilitas dalam kurun waktu yang panjang, dengan tujuan untuk menunda, menjarangkan, atau menghentikan kesuburan. Tipe-tipe kontrasepsi yang termasuk dalam kategori MKJP antara lain adalah Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau IUD, Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) atau implan, serta prosedur medis seperti Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi, dan Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi (Kependudukan & Nasional, 2016). MKJP dikenal memiliki risiko kegagalan yang sangat kecil, lebih aman digunakan, dan lebih terjangkau dibandingkan dengan pencegahan kehamilan sementara. MKJP efektif melindungi dari kehamilan kurang lebih setahun hanya dengan satu prosedur tanpa perlu diulang (Shimeka Teferra, 2015).

Penggunaan MKJP memberikan berbagai keuntungan. Di Indonesia, pemerintah telah melaksanakan sejumlah program untuk mendorong penggunaannya, termasuk menetapkan kebijakan yang menganjurkan masyarakat memilih pencegah kehamilan yang berhasil, optimal, dan dapat digunakan pada frekuensi waktu lama. (Asih dan Oesman, 2009).

Beberapa pertimbangan berpengaruh pada pilihan individu untuk menggunakan alat pencegah kemahilan. Beberapa pertimbangan utama meliputi faktor pribadi, kondisi kesehatan, serta aspek dari metode kontrasepsi itu sendiri, seperti biaya serta kemungkinan efek samping. (Hartanto, 2015).

Pemilihan metode kontrasepsi yang tepat merupakan faktor kunci dalam program keluarga berencana. Pemakaian kontrasepsi non MKJP lebih dominan di Indonesia, terutama karena harganya yang lebih terjangkau, walaupun biaya pemasangan MKJP cenderung lebih mahal (Arliana dkk, 2013). Meski demikian, tingkat keberlanjutan penggunaan kontrasepsi non-MKJP cenderung lebih rendah dibandingkan dengan MKJP (BKKBN, 2013). Salah satunya Kabupaten Banyuasin, di mana berdasarkan RENSTRA Tahun 2024-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2PAP2KB) masih rendahnya peserta KB yang memakai MKJP apabila dibandingkan dengan pemakaian jenis Kontrasepsi non Jangka Panjang. Tabel 1.1 Menunjukkan persentase jumlah pemakaian MKJP per Kabupaten Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 1.1 Indikator Prevalensi Pemakaian MKJP Per Kabupaten Wilayah
Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kabupaten/Kota	2023
		PK 23
1	Kabupaten Musi Rawas	29.60
2	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	29,51
3	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	27,29
4	Kabupaten Musi Banyuasin	20,55
5	Kabupaten Banyuasin	18,16

Sumber: Siperindu BKKBN

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dari 5 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin menempati urutan kelima dengan jumlah persentase penggunaan MKJP sebanyak 18,16%.

Berdasarkan RENSTRA Tahun 2024-2026 DP2PAP2KB terdapat beberapa tantangan di dalam penggunaan metode MKJP di Kabupaten Banyuasin diantaranya sedikitnya jumlah peserta KB Aktif yang mengikuti Program MKJP. Gambar 1.2. Menunjukkan jumlah peserta KB Aktif Kabupaten Banyuasin tahun 2023.

Gambar 1.2 Data Jumlah Peserta KB Aktif per Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2023

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEXTOMI	MAL	TOTAL	
1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Σ(4-11)	13
01	BANYUASIN I	6885	4733	787	164	923	68	9	163	1	6848	37
02	BANYUASIN II	2822	2017	302	39	352	47	1	58	0	2816	6
03	BANYUASIN III	7654	4436	1065	211	1463	94	19	318	1	7607	47
04	PULAU RIMAU	3098	1763	567	126	575	16	2	33	0	3082	16
05	BETUNG	6088	4135	619	166	921	66	18	143	0	6068	20
06	RAMBUTAN	5670	3779	969	148	566	82	8	98	0	5650	20
07	MUARA PADANG	4099	2806	476	46	683	27	2	48	0	4088	11
08	MUARA TELANG	5321	3876	666	27	675	30	4	36	0	5314	7
09	MAKARTI JAYA	3031	1691	322	87	845	10	1	54	1	3011	20
10	TALANG KELAPA	12752	9552	1483	199	1042	172	8	217	7	12680	72
11	RANTAU BAYUR	4603	3327	469	116	620	12	10	45	0	4599	4
12	TANJUNG LAGO	4564	3086	539	107	652	105	1	65	3	4558	6
13	MUARA SUGIHAN	6162	3934	1032	62	1072	14	2	39	1	6156	6
14	AIR SALEK	5177	3250	863	57	929	27	6	37	0	5169	8
15	TUNGKAL ILIR	2906	1862	303	40	627	10	3	55	1	2901	5
16	SUAK TAPEH	2534	1476	315	101	525	23	22	61	1	2524	10
17	SEMBAWA	5842	3465	893	204	1007	97	17	115	14	5812	30
18	SUMBER MARGA TELANG	2364	1554	169	24	554	20	1	41	0	2363	1
19	AIR KUMBANG	3906	2165	813	139	714	26	0	41	1	3899	7
20	KARANG AGUNG ILIR	1627	1055	177	70	308	8	0	9	0	1627	0
21	SELAT PENUGUAN	2883	2049	291	74	442	4	0	13	0	2873	10
JUMLAH TOTAL		99988	66011	13120	2207	15495	958	134	1689	31	99645	343

Sumber: DP2PAP2KB Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, jumlah peserta KB aktif lebih banyak menunjukkan angka penggunaan Metode Kontrasepsi non Jangka Panjang dibandingkan MKJP. Lebih lanjut, di dalam RENSTRA Tahun 2024-2026 DP2PAP2KB, permasalahan terkait MKJP juga masih terdapat tantangan lain, di antaranya masih tinggi kekhawatiran masyarakat akan efek samping alat dan obat

kontrasepsi, dan masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Program KB secara keseluruhan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 DP2PAP2KB, dalam Indikator Kinerja Persentase Penggunaan MKJP DP2PAP2KB menargetkan sebesar 50,00%, sedangkan pada data yang tertera pada tabel 1.1, capaian target MKJP Kabupaten Banyuasin pada 2023 sebanyak 18,16%.

Mengacu dari permasalahan yang terjadi mengenai penggunaan MKJP di Kabupaten Banyuasin dilihat dari penyebab, dampak, dan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas P2PAP2KB. Maka dari itu, muncul pertanyaan penelitian atau *research question*, yaitu “Apa saja strategi yang dapat dilakukan oleh DP2PAP2KB Kabupaten Banyuasin untuk meningkatkan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)?”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya gap antara target capaian yang dijanjikan di dalam Perjanjian Kinerja DP2PAP2KB dengan realisasi Penggunaan MKJP Tahun 2023.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Banyuasin yang memakai MKJP jika dibandingkan dengan pemakaian jenis Kontrasepsi non Jangka Panjang.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dan realita yang terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya penyelesaian dengan menjawab permasalahan yang ada.

Dari identifikasi masalah tersebut, muncul isu yang perlu dipecahkan, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana strategi yang dapat dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2PAP2KB) Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)?”**

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan oleh Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan penggunaan MKJP.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Publik mengenai strategi yang dilakukan oleh Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan penggunaan MKJP.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif oleh DP2PAP2KB dalam mengembangkan strategi penggunaan MKJP, khususnya penggunaan kontrasepsi jangka panjang.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk membandingkan dan membedakan penelitian ini dengan studi-studi yang telah ada. Beberapa penelitian terkait manajemen strategis yang relevan antara lain sebagai berikut.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/TAHUN/JUDUL/JURNAL	PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Wulansari, A., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Strategi dinas koperasi dan umkm kabupaten karawang dalam pemberdayaan umkm. <i>JPAP: Jurnal Penelitian</i>	Studi ini berfokus pada analisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk memajukan dan memperkuat UMKM.	Studi ini menggunakan studi kasus sebagai metode kualitatif.	Temuan studi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas UMKM yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten belum berjalan secara efektif dan efisien. Indikatornya adalah belum optimalnya

	<i>Administrasi Publik</i> , 7(1).			penyaluran bimbingan kepada pelaku UMKM dan masih adanya kesenjangan dalam akses terhadap dana pemerintah.
2.	Anggraini, S. Z., & Tukiman, T. (2022). Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Sidoarjo. <i>Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi</i> , 22(3), 2220-2226.	Studi ini difokuskan pada pengkajian strategi yang dijalankan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam upaya menciptakan peluang kerja yang lebih luas dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja yang efektif.	Jenis penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.	Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo meningkatkan penempatan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja melalui program Bursa Kerja Terbuka/ <i>Job Fair</i> , baik online maupun offline di Alun-Alun Sidoarjo. Meskipun program ini berjalan cukup baik, ada beberapa tantangan, seperti sebagian pencari kerja yang kesulitan mendaftar secara online dan memilih pekerjaan yang tidak sesuai keahlian. Evaluasi program juga efektif dengan mencatat pencari kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan.
3.	Pongantung, M. C., Dengo, S., & Mambo, R. (2021). Manajemen strategis pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. <i>Jurnal Administrasi Publik</i> , 7(103).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Strategis Pemerintah Desa dalam mengembangkan pelayanan sektor umum di Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis SWOT.	Hasil analisis SWOT mengidentifikasi enam isu strategi utama. Setelah diuji dengan Litmus Test, empat isu dinilai strategis: peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik, penetapan kebijakan jelas untuk pelayanan dan loyalitas aparatur, serta peningkatan sarana dan prasarana. Dua isu lainnya, yang cukup strategis,

				adalah peningkatan sosialisasi program untuk partisipasi masyarakat dan koordinasi antar pegawai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
4.	Mubarakh, F. A., Yulianti, R., & Yusuf, M. (2021). Implementasi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Sampah Di Kota Serang. <i>Jurnal Administrasi Publik</i> , 12(2).	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi strategi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam menangani sampah di Kota Serang.	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Serang masih belum berjalan maksimal. Meskipun ada program yang telah direncanakan, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi pelaksanaannya. Proses pengawasan terhadap sampah liar juga belum efektif, dan anggaran yang tersedia masih dirasa kurang mencukupi untuk menangani masalah sampah di Kota Serang. Akibatnya, masyarakat Kota Serang belum sepenuhnya memahami cara mengelola sampah dengan baik.
5.	Kadow, T., Dengo, S., & MAMBO, R. (2021). Strategi Dinas Perpustakaan Daerah dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. <i>Jurnal Administrasi Publik</i> , 7(109).	Penelitian ini mengkaji faktor dan strategi yang dibutuhkan Dinas Perpustakaan Bolaang Mongondow Timur untuk meningkatkan minat baca.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana data dianalisis dengan menggunakan	Analisis SWOT Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menghasilkan 11 isu strategis untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Setelah uji tes litmus, 5 strategi terbukti efektif, yaitu: peningkatan layanan perpustakaan dengan optimalisasi mobil perpustakaan, penyelenggaraan festival

			kerangka analisis SWOT (Arnold) (Fahmi, 2011).	membaca, dan permohonan bantuan perpustakaan digital ke Perpustakaan Nasional.
6.	Rahmi, N., & Rasanjani, S. (2023). Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh DP3AP2KB <i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik</i> , 8(1).	Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi DP3AP2KB Banda Aceh dalam menanggulangi kekerasan seksual anak dan faktor penurunannya.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif.	Temua dari studi ini adalah strategi DP3AP2KB dalam penanganan kekerasan seksual anak mencakup penanganan, perlindungan, pencegahan, koordinasi, dan evaluasi. Penurunan angka kekerasan dipengaruhi kebijakan, pengawasan orang tua, sarana prasarana, kerjasama.
7.	Afrizal, F., & Oktariyanda, T. A. (2021). Manajemen Strategi Desa Wisata Gronjong Wariti Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Mejono Kabupaten Kediri. <i>Publika</i> , 171-184.	Penelitian ini mengkaji manajemen strategi Desa Wisata Gronjong Wariti dalam mendongkrak perekonomian Desa Mejono, Kediri.	Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa pembentukan strategi dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak swasta dan melakukan diversifikasi wahana wisata. Pelaksanaan strategi tersebut didukung oleh pembentukan regulasi yang komprehensif dan ditegakkan secara konsisten. Pada tahap akhir, yaitu evaluasi, dilakukan perbaikan dan pengukuran terhadap kinerja yang telah dicapai sebagai dasar untuk perbaikan selanjutnya.
8.	Musri, M. (2021). Strategi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Dalam Pengembangan	Penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengembangan pariwisata yang	Penelitian ini menggunakan pendekatan	Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan potensi wisata di Kecamatan Koto XI Tarusan yang dilakukan

	Potensi Wisata Kawasan Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. <i>Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi</i>, 1(2), 72-82.	dijalankan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga di Kecamatan Koto XI Tarusan, dengan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dan menawarkan alternatif solusi untuk optimalisasi pengembangan potensi wisata di wilayah tersebut.	n studi kasus kualitatif.	oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga masih menemui sejumlah tantangan dan hambatan dalam implementasi strateginya.
9.	Nuraini, S., & Puspitasari, D. (2022). Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Di Masa Pandemi Covid-19. <i>Governance</i>, 10(2), 49-64.	Studi ini menelaah upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam menanggulangi pengangguran saat pandemi Covid-19.	Studi ini menggunakan metode kualitatif.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam menghadapi tantangan pengangguran selama pandemi Covid-19, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah mengambil langkah-langkah strategis, antara lain penyediaan informasi lowongan pekerjaan melalui kegiatan <i>job fair</i> dan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti pelatihan berbasis kompetensi, teknologi, dan kewirausahaan. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa strategi-strategi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka pengangguran terbuka, karena data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kota

				Bekasi masih mengalami peningkatan.
10.	Damayanti, I. (2022). Strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta Dalam Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2021. <i>Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial</i> , 6(1).	Penelitian ini mengkaji strategi Dinas Dukcapil Surakarta dalam mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.	Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta bertujuan meraih predikat Zona Integritas WBBM setelah mempertahankan WBK. Untuk mencapainya, mereka menerapkan strategi inovasi, pelatihan SDM berbasis kompetensi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal.

Sumber: Diolah dari beberapa jurnal

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Wulansari, Lukmanul Hakim, dan Rachmat Ramdani yang berjudul “Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM” memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama fokus pada strategi yang diterapkan oleh instansi untuk mendukung peningkatan atau pengembangan. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian; penelitian tersebut menggunakan Dinkopukm sebagai lokasi penelitian, sementara penelitian ini mengambil DP2PAP2KB sebagai objek penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Zunita Anggraini dan Tukiman dengan judul “Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Sidoarjo”

memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama meneliti strategi yang diterapkan oleh instansi dalam upaya peningkatan atau pengembangan. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian; penelitian tersebut mengambil Disnaker sebagai objek studi, sedangkan penelitian ini fokus pada DP2PAP2KB.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Christina Pongantung, Salmin Dengo, dan Rully Mambo dengan judul “Manajemen Strategis Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan” memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama fokus pada strategi yang diterapkan oleh instansi dalam rangka peningkatan atau pengembangan. Namun, perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian; penelitian tersebut mengkaji Pemerintah Desa sebagai objek studi, sementara penelitian ini berfokus pada DP2PAP2KB.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Farhans Azis Mubarakh, Rina Yulianti, dan Maulana Yusuf dengan judul “Implementasi Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Menangani Sampah di Kota Serang” memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu keduanya meneliti strategi yang diterapkan oleh instansi untuk tujuan peningkatan atau pengembangan. Namun, perbedaan terletak pada lokasi penelitian; penelitian tersebut berfokus pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai objek studi, sedangkan penelitian ini mengambil DP2PAP2KB sebagai situs penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Toby Kandow, Salmin Dengo, dan Rully Mambo yang berjudul “Strategi Dinas Perpustakaan Daerah dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur” juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meneliti strategi yang diterapkan oleh instansi dalam rangka peningkatan atau pengembangan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian; dalam penelitian tersebut, fokusnya adalah pada Dinas Perpustakaan Daerah, sementara penelitian ini mengkaji DP2PAP2KB.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nuzulul Rahmi, Nofriadi, dan Saddam Rasanjani dengan judul “Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh DP3AP2KB di Kota Banda Aceh” memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu keduanya mengkaji strategi yang diterapkan oleh instansi dalam rangka peningkatan atau pengembangan dan menggunakan DP2PAP2KB sebagai objek penelitian. Perbedaannya terletak pada fokus bidangnya; penelitian tersebut lebih berfokus pada Perlindungan Anak, sementara penelitian ini berfokus pada bidang Keluarga Berencana.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmri Afrizal dan Tenda Aktiva Oktariyanda yang berjudul “Manajemen Strategi Wisata Gronjong Wariti dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Mejono Kabupaten Kediri” memiliki kesamaan dalam hal fokus pada strategi yang diterapkan oleh instansi untuk tujuan peningkatan atau pengembangan. Namun, perbedaan

utamanya ada pada lokasi penelitian; penelitian tersebut berfokus pada Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat, sedangkan penelitian ini menyoroti DP2PAP2KB.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Musri dengan judul “Strategi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dalam Pengembangan Potensi Wisata Kawasan Mandeh” memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji strategi yang diterapkan oleh instansi untuk tujuan peningkatan atau pengembangan. Namun, perbedaan terletak pada lokasi penelitian; penelitian ini berfokus pada Disparpora, sementara penelitian ini meneliti DP2PAP2KB.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Dhuwi Puspitasari dan Siti Nuraini yang berjudul “Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Masa Pandemi Covid-19” memiliki kesamaan dengan penelitian ini, karena sama-sama meneliti strategi yang digunakan oleh instansi dalam peningkatan atau pengembangan. Perbedaannya terletak pada situs penelitian; penelitian tersebut menggunakan Disnaker sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan DP2PAP2KB.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Damayanti berjudul “Strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2021” memiliki persamaan, yaitu sama-sama meneliti strategi yang diterapkan oleh

instansi untuk tujuan peningkatan atau pengembangan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian; penelitian ini menggunakan Disdukcapil, sementara penelitian ini menggunakan DP2PAP2KB sebagai objek penelitian.

1.6.2 Administrasi Publik

Nicholas dalam Pasolong (2010:8), menyatakan bahwa “Administrasi publik adalah gabungan antara teori dan praktik yang bertujuan untuk memahami cara pemerintah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Tujuan utama dari administrasi publik adalah untuk memastikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat menjawab kebutuhan sosial masyarakat secara efektif dan responsif.”

Chandler dan Plano dalam Pasolong (2010:7), menyatakan bahwa “Administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi SDM di sektor publik untuk merancang, melaksanakan, dan mengelola keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan publik.”

Menurut Pasolong (2010:8), Administrasi publik adalah kolaborasi antara individu atau lembaga pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan efisien serta efektif.

Menurut Gray dalam Pasolong (2010:18), fungsi administrasi publik di masyarakat meliputi:

- a. Memastikan bahwa distribusi pendapatan nasional dilakukan secara adil, dengan perhatian khusus pada kelompok masyarakat miskin.

b. Memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat serta memberi jaminan atas kebebasan individu untuk bertanggung jawab dalam hal kesehatan, pendidikan, serta layanan untuk kelompok lansia.

Menurut Harbani Pasolong (2010:17), Stephen P. Robbins mengidentifikasi beberapa teori administrasi yang penting:

1. Teori Hubungan Manusia: Elton Mayo, sebagai perintis, menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam tempat kerja terhadap perilaku individu, menyoroti bahwa faktor-faktor sosial seperti norma sosial memainkan peran kunci dalam produktivitas kerja.
2. Teori Pengambilan Keputusan: Pendekatan ini mengusulkan penggunaan statistik, model optimasi, simulasi, dan pengetahuan lainnya seperti pemrograman linear dan model persediaan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Teori Perilaku: Fokus pada peran penting perilaku manusia dalam mencapai tujuan organisasi, menekankan psikologi dan motivasi individu dalam kinerja organisasi.
4. Teori Sistem: Memandang organisasi sebagai sistem yang menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output, menekankan pentingnya pemahaman terhadap dinamika internal organisasi.

5. Teori Kontigensi: Menyoroti pentingnya kesesuaian dan adaptabilitas organisasi terhadap perubahan teknologi dan lingkungan, dengan menekankan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang sesuai untuk semua situasi.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik berakar pada prinsip-prinsip manajemen dan terus berkembang seiring waktu. Banyak ahli berpendapat bahwa administrasi publik memainkan peran penting dalam mengelola organisasi serta pengelolaan pemerintahan dalam menjalankan pengaruh politiknya, meliputi dalam tahap pembuatan kebijakan. Seiring berjalannya waktu, studi dan penyelenggaraan administrasi lintas negara terus beradaptasi, mengikuti perkembangan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh para pengelola publik.

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu telah mengalami perkembangan yang kompleks. Literatur menjelaskan evolusi ini melalui pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma administrasi publik menurut Nicolas Henry (2007 dalam Astuti, 2020: 22) adalah sebagai berikut:

1. ***The Politics - Administration Dichotomy, (1900 – 1926);***

Paradigma "*The Politics-Administration Dichotomy*" beranggapan bahwa pemisahan politik dan peran administrasi negara dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ide ini pertama kali

dikemukakan oleh Woodrow Wilson dalam esainya "*The Study of Administration*" yang dipublikasikan di *Political Science Quarterly* pada tahun 1897 (Basheka, 2012). Wilson menyarankan empat syarat untuk mencapai tata kelola publik yang berhasil:

1. Diferensiasi antara politik dan administrasi.
2. Perbandingan antara lembaga politik dan sektor privat.
3. Penerapan operasional bisnis untuk meningkatkan efisiensi dalam operasi sehari-hari.
4. Mengoptimalkan layanan publik dengan mengelola dan melatih pegawai negeri, serta menilai mereka berdasarkan pencapaian.

Pandangan tersebut tidak hanya menyediakan dasar teori yang kokoh bagi tata kelola publik, tetapi juga memperkenalkan objektivitas ilmiah melalui pembedaan "fakta" dan "nilai" (Henry, 2007).

2. *The Principles of Administration*, (1927 – 1937);

Paradigma kedua, "*The Principles of Administration*," menelaah asas-asas dasar pengelolaan. Pandangan tersebut dimulai dengan penerbitan buku *Principles of Public Administration* oleh W. F. Willoughby tahun 1927. Di sisi lain, ada sebagian karya penting lainnya seperti *Creative Experience* oleh Mary Parker Follett (1924), *Industrial and General Management* oleh Henri Fayol (1930), dan

Principles of Organization oleh James D. Mooney dan Alan C. Riley (1939).

Yang paling dikenal adalah buku *Papers on the Science of Administration* oleh Luther H. Gulick dan Lyndall F. Urwick (1937), yang merumuskan tujuh asas pengelolaan, yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penyediaan Staf (*Staffing*), Pengarahan (*Directing*), Koordinasi (*Coordinating*), Pelaporan (*Reporting*), dan Penganggaran (*Budgeting*).

Pandangan ini menekankan bahwa prinsip-prinsip administrasi tersebut bersifat universal dan dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi dan dalam berbagai konteks sosial budaya.

3. ***Public Administration as Political Science, (1950 – 1970);***

Menurut Henry (2007), pandangan ketiga, "*Public Administration as Political Science*," menggambarkan tata kelola publik menjadi bagian dari ilmu politik. Henry mencatat adanya dorongan besar oleh para pengamat politik agar mengintegrasikan ulang tata kelola publik dalam disiplin ilmu politik. Di waktu yang sama, para ahli manajemen berusaha menganggap administrasi publik sebagai cabang dari ranah manajemen.

Paradigma ini berupaya untuk membangun ulang keterikatan antara administrasi dan ilmu politik. Hal tersebut mencerminkan upaya

agar menghubungkan kembali administrasi publik dengan akar ilmu politiknya, sebagai respons terhadap perubahan dan pembaruan dalam bidang tersebut.

4. *Public Administration as Management, (1956 – 1970);*

Menurut Henry, paradigma keempat dikenal sebagai "*public administration as management*." Dalam fase ini, para ahli manajemen berhasil menegaskan bahwa administrasi publik merupakan ranah dari ilmu manajemen.

Pandangan ketiga dan keempat, terlihat adanya persaingan antara dua bidang ilmu, yakni politik dan manajemen, yang masing-masing berusaha mengklaim administrasi publik sebagai bagian dari disiplin mereka.

5. *Public Administration as Public Administration, (1970 – sekarang);*

Pada tahap "*public administration as public administration*," atau dapat disebut dengan "*new public management*" (NPM), administrasi publik mulai diakui sebagai bidang studi independen. Fokusnya pun bergeser dari struktur hierarki dan birokrasi tradisional menuju pendekatan pasar dan korporasi. Dengan demikian, terdapat perubahan signifikan dari sistem administrasi publik yang lama ke

sistem NPM. Henry mencatat bahwa proses ini merupakan perubahan yang paling nyata dalam perkembangan administrasi publik.

Namun, NPM juga tidak lepas dari tantangan, terutama terkait dengan ketidakefisienan dalam sistem administrasi. Masalah ini muncul karena upaya untuk mengadopsi teori ekonomi dan praktik manajemen yang biasa digunakan di manajemen swasta ke ranah publik. Pergeseran paradigma NPM ini bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam sektor publik, sehingga menciptakan model bisnis baru dalam administrasi publik. Hubungan antara sektor swasta dan publik tersebut diketahui dengan prinsip "*governance*."

6. *Governance*, (1990 – sekarang).

Menurut Tamayao (2014), paradigma terakhir yang dikenal dengan istilah "*governance*" merujuk pada cara pemimpin politik menjalankan kekuasaan atau otoritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai pihak dari berbagai sektor yang berkolaborasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, dan distribusi kebijakan publik yang mempengaruhi masyarakat dan lembaga, serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi.

Istilah "*governance*" mengacu pada cara pemerintahan modern yang kontras dengan pendekatan pemerintahan konvensional. Dalam sistem *governance*, tahapan politik menjadi lebih inklusif, di mana rakyat dan komunitas masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik memiliki dampak besar (Ikeanyibe, 2016). Selain itu, dalam sistem ini, sektor lain—baik yang menguntungkan secara finansial maupun tidak—diharuskan turut berperan dalam penyediaan layanan, dengan pemerintah berfungsi sebagai pengarah dan pengatur.

Secara umum, *governance* menekankan pentingnya desentralisasi, di mana kekuasaan dan fungsi dibagi antara berbagai pihak, seperti yayasan, korporasi, dan berbagai level pemerintah (Ewalt, 2001). Intinya, *governance* menuntut adanya kerjasama yang erat antara berbagai pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mengikutsertakan masyarakat, lembaga masyarakat, serta Lembaga pemerintahan dan Perusahaan (Gibson, 2011).

Penelitian ini menggunakan paradigma *Public Administration as Management*, Paradigma ini menekankan penggunaan pendekatan manajemen dalam administrasi publik, termasuk perancangam, penataan, implementasi, dan pengawasan program, agar tercapainya tujuan kebijakan publik secara efektif dan efisien. Pendekatan ini relevan dalam penelitian ini, yang berfokus

pada perancangan dan penerapan strategi yang efektif untuk meningkatkan penggunaan MKJP di Kabupaten Banyuasin.

1.6.4 Manajemen Publik

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue dalam bukunya *Dasar-Dasar Manajemen* (2005), manajemen adalah proses yang mencakup pengarahan dan pengarahannya sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, manajemen publik merujuk pada penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam lembaga pemerintah. Overman menjelaskan bahwa manajemen publik tidak "*scientific management*," walaupun konsep tersebut memberi pengaruh yang signifikan. Manajemen publik juga tidak sama dengan "*policy analysis*" atau administrasi publik. Sebaliknya, manajemen publik adalah disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner, mencakup berbagai aspek organisasi secara umum. Hal melibatkan penerapan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, serta pengelolaan berbagai sumber daya, termasuk tenaga kerja, anggaran, aset fisik, data, dan kekuasaan..

1.6.5 Manajemen Strategis

Menurut Wheelen dan Hunger (2006), Strategi adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh para pemimpin puncak organisasi yang mengidentifikasi target organisasi, sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut, dan kebijakan yang akan memandu pengambilan keputusan.

Manajemen strategis berdasarkan pendapat para ahli di atas adalah seni dan ilmu mengatur serta mengelola proses manajemen organisasi dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan serangkaian keputusan yang diambil oleh para pemimpin puncak organisasi yang mengidentifikasi tujuan organisasi, menentukan sumber daya yang akan digunakan, serta menetapkan kebijakan yang akan memandu pengambilan keputusan agar meraih tujuan tersebut berhasil dan optimal.

Manajemen strategis biasanya merujuk pada serangkaian langkah yang mencakup perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi. Tujuan utamanya adalah untuk memanfaatkan dan menciptakan peluang-peluang baru yang berbeda untuk masa depan. Sementara itu, perencanaan jangka panjang lebih fokus pada mengoptimalkan kondisi yang ada saat ini untuk digunakan di masa depan (Fred R. David, 2009: 5).

1.6.5.1 Tahap-tahap Manajemen Strategis

Fred R. David (2009: 6) menjelaskan tahapan manajemen strategi terdapat dari tiga tahapan utama, yaitu: perumusan, implementasi, dan evaluasi.

1. Perumusan strategi: Pada tahap ini, proses dimulai dengan merumuskan visi dan misi yang jelas, kemudian mengidentifikasi kesempatan dan hambatan dari faktor luar. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap potensi dan kelemahan internal organisasi. Setelah

itu, tujuan jangka panjang ditetapkan, diikuti dengan pencarian berbagai alternatif strategi yang bisa dipilih untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Penerapan strategi: Implementasi dari strategi yang telah dipilih, mengatur sumber daya, dan memastikan bahwa semua bagian organisasi selaras dengan rencana yang telah dibuat.

3. Penilaian strategi: Evaluasi dan revisi strategi secara berkala untuk memastikan relevansinya. Tiga aktivitas utama dalam penilaian strategi adalah:

- a. Evaluasi faktor-faktor penentu strategi
- b. Menilai performa organisasi.
- c. Melakukan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.

Penilaian strategi sangat penting karena kondisi eksternal dan internal organisasi terus berubah, sehingga strategi yang sukses sekarang mungkin tidak efektif di masa mendatang.

1.6.5.2 Analisis Lingkungan Strategis

Menurut Freddy Rangkuti (2006), analisis lingkungan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Analisis lingkungan internal dan eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor penting yang memengaruhi organisasi. Pada lingkungan internal, analisis difokuskan pada kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) organisasi. Sementara itu, pada lingkungan eksternal, perhatian diarahkan pada peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang timbul dari kondisi di luar organisasi.

1. Lingkungan Internal

Menurut Rangkuti (2006), Lingkungan internal mencakup faktor-faktor yang berada dalam kendali organisasi, yang menjadi kekuatan (*strengths*) atau kelemahan (*weaknesses*). Indikator dalam lingkungan internal ini meliputi:

- a) Visi dan Misi: Visi adalah sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, sementara misi mencakup langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut.
- b) Sumber Daya Manusia: Sumber daya manusia mencakup seluruh individu atau karyawan yang terlibat langsung dalam berbagai aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- c) Anggaran: Stabilitas keuangan dan efisiensi penggunaan anggaran.

d) Sarana dan Prasarana: Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor di luar kendali organisasi yang dapat menjadi peluang (*opportunities*) atau ancaman (*threats*). Faktor-faktor ini meliputi:

a) Sosial dan Budaya: Perubahan demografi, nilai-nilai sosial, dan preferensi masyarakat.

b) Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan daya beli masyarakat.

c) Teknologi: Perkembangan teknologi yang menciptakan peluang atau ancaman.

d) Keterlibatan *Stakeholders*: Individu atau organisasi yang berperan dalam mendukung serta memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

e) Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan atau keikutsertaan warga yang didasari oleh kesadaran akan pentingnya peran aktif mereka dalam kegiatan tersebut.

1.6.5.3 Analisis SWOT

Fredy Rangkuti (2013: 18) menerangkan tentang analisis SWOT ialah proses analisis faktor-faktor yang berperan dalam perumusan strategi suatu organisasi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), sambil mengurangi kelemahan (*weakness*) dan menghadapi ancaman (*threat*) yang ada.

Galavan dalam Lusiana (2020: 4), menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah analisis yang bertujuan menghasilkan strategi optimal sesuai keadaan dan lingkungan yang terjadi saat itu. Kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dapat diidentifikasi melalui analisis dari dalam organisasi, sedangkan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) digunakan untuk menganalisis lingkungan luar organisasi.

Menurut Pearce dan Robinson (2013: 52), penjabaran mengenai SWOT (*strength*, *weakness*, *opportunity*, *threat*) sebagai berikut:

- a. *Strength* (Kekuatan) adalah sumber daya dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh organisasi. Kekuatan ini dapat dikendalikan dan diandalkan untuk membuat organisasi menjadi lebih unggul dibandingkan pesaingnya.

b. *Weakness* (Kelemahan) adalah kekurangan atau keterbatasan yang dimiliki oleh organisasi. Kelemahan dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi.

c. *Opportunity* (Peluang) adalah situasi yang dapat menguntungkan organisasi dan dapat dimanfaatkan untuk menjadi sebuah potensi mencapai tujuan utama. Perubahan dari luar organisasi seperti perubahan regulasi, teknologi, dan persaingan dapat menjadi sebuah peluang bagi organisasi.

d. *Threat* (Ancaman) adalah situasi yang tidak menguntungkan organisasi, di mana terdapat kemungkinan-kemungkinan atau ancaman yang bisa menimpa organisasi. Ancaman merupakan faktor yang menjadi penghalang suatu organisasi untuk mencapai posisi atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pandangan para ahli, analisis SWOT adalah metode identifikasi serta membandingkan kondisi internal dan eksternal organisasi yang terdiri dari kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) untuk mengevaluasi suatu masalah pada organisasi dan menghasilkan strategi untuk mengatasinya.

Analisis dari lingkungan internal dan eksternal tersebut kemudian dibandingkan dan dicocokkan ke dalam suatu matriks

SWOT dan dikembangkan menjadi perencanaan yang strategis. Matriks SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) adalah instrument yang dipakai guna mengevaluasi banyak faktor internal dan eksternal yang memengaruhi suatu organisasi. Maksud analisis ini ialah agar memaksimalkan potensi keunggulan dan kesempatan yang dimiliki, serta meminimalkan kelemahan dan menghadapi hambatan yang mungkin muncul.

Matriks SWOT merupakan alat yang dapat mengembangkan empat tipe strategi : S-O (kekuatan-peluang; *strength-opportunity*), W-O (kelemahan-peluang; *weakness-opportunity*), S-T (kekuatan-ancaman; *strength-threat*), dan W-T (kelemahan-ancaman; *weakness-threat*). Strategi dalam Matriks SWOT:

1) Strategi SO (*Strength – Opportunity*), adalah mengoptimalkan kekuatan organisasi untuk memanfaatkan seluruh peluang

2) Strategi WO (*Weakness – Opportunity*), adalah strategi yang fokus pada perbaikan kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Meskipun organisasi memiliki kelemahan, strategi ini berfokus pada cara untuk mengubah kelemahan tersebut menjadi keunggulan dengan memanfaatkan peluang yang muncul di luar organisasi.

3) Strategi ST (*Strength – Threat*), adalah strategi berbasis kekuatan untuk menghadapi ancaman.

4) Strategi WT (*Weakness – Threat*), adalah strategi pertahanan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman.

Tabel 1.3 Matriks SWOT

Internal Eksternal	STRENGTHS (S) Faktor-faktor kekuatan	WEAKNESSES (W) Faktor-faktor kelemahan
	<u>STRATEGI SO</u> Merancang strategi dengan memanfaatkan kelebihan dalam pemanfaatan peluang.	<u>STRATEGI WO</u> Merancang strategi yang meminimalisir kekurangan dalam pemanfaatan peluang.
THREATS (T) Faktor-faktor ancaman	<u>STRATEGI ST</u> Merancang strategi dengan memanfaatkan kelebihan dalam menangani hambatan.	<u>STRATEGI WT</u> Merancang strategi untuk meminimalisir kekurangan serta menjauhi hambatan.

Sumber: Rangkuti (2014).

Hasil dari analisis SWOT selanjutnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan berbagai isu strategis. Menurut Bryson dalam Oktosilva (2018: 20), proses identifikasi strategi dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Menganalisis kembali keunggulan, kekurangan, kesempatan, dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi.
2. Menggunakan metode yang paling cocok dan efektif berdasarkan kondisi yang sedang dilalui.

3. Menyaring permasalahan strategis dalam mempertimbangkan prioritas dan memanfaatkan pertimbangan yang jelas.
4. Menggunakan Uji Litmus untuk menilai sejauh mana isu tersebut memiliki tingkat kestrategisan.
5. Mendiskusikan dan melakukan revisi terhadap isu-isu yang ada jika diperlukan.

1.6.5.4 Uji Tes Litmus (*Litmus Test*)

Uji litmus menurut Bryson (2005) digunakan untuk mengembangkan ukuran tentang seberapa strategis suatu isu. Dalam proses ini, setiap isu yang teridentifikasi dinilai melalui serangkaian pertanyaan yang menghasilkan skor, di mana isu dengan skor tertinggi dianggap paling strategis dan isu dengan skor terendah dianggap operasional. Bryson menjelaskan bahwa "tes litmus digunakan untuk menyaring isu-isu strategis" dan memberikan panduan tentang bagaimana mengukur tingkat kestrategisan dari isu-isu tersebut.

Tabel 1.4 Tabel Uji Litmus

No	Pertanyaan	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3
1	Kapan tantangan atau peluang isu strategis tersebut dihadapi?	Sekarang	Tahun Depan	Dua Tahun atau Lebih
2	Seberapa luas pengaruh suatu isu terhadap departemen?	Unit/Divisi Tunggal	Beberapa Devisi	Seluruh Departemen
3	Seberapa besar risiko/peluang	Kecil ($\leq 10\%$ dari anggaran)	Sedang (10%-25%)	Besar ($> 25\%$ dari)

	keuangan organisasi?		dari anggaran)	anggaran)
4	Apakah strategi bagi penyelesaian isu memerlukan: a. Pengembangan sasaran baru? b. Perubahan signifikan? c. Modifikasi fasilitas? d. Penambahan staff?	Tidak	Ya	
5	Bagaimana pendekatan terbaik bagi penyelesaian isu?	Jelas, siap diimplementasikan	Parameter luas, agak terperinci	Terbuka luas
6	Tingkat manajemen manakah yang dapat menetapkan cara menyelesaikan isu?	Pengawasan staf lini	Kepala Divisi	Kepala Departemen
7	Apa konsekuensi jika isu tidak ditangani?	Ada gangguan, inefisiensi	Kekacauan pelayanan	Biaya besar, penghasilan turun
8	Seberapa banyak departemen lain yang terpengaruh dan dilibatkan dalam pemecahan isu?	Tidak ada	Satu sampai tiga	Empat atau lebih
9	Bagaimana sensitivitas isu ini terhadap nilai sosial, politik, religius, dan kultural?	Lunak	Sedang	Keras

Sumber: Bryson (2005).

Proses penilaian dilakukan dengan mengajukan 13 pertanyaan kepada setiap isu strategis. Setiap pertanyaan dinilai dengan skala:

Skor 1: Isu operasional

Skor 2: Isu cukup strategis

Skor 3: Isu sangat strategis

Setelah penilaian, total skor dihitung untuk menentukan kategori strategis dari isu tersebut:

13-21: Isu kurang strategis

22-30: Isu cukup strategis

31-39: Isu sangat strategis.

1.6.5.5 Kontrasepsi

Teori Bertrand (1980) mengidentifikasi tiga aspek yang menentukan pemilihan kontrasepsi: faktor sosiodemografi seperti umur, edukasi, mata pencarian, dan ekonomi; faktor sosio-psikologis seperti pengalaman melahirkan, sikap terhadap kelahiran anak laki-laki, dan dukungan suami; dan faktor pelayanan termasuk partisipasi dalam program KB, pengetahuan, dukungan tenaga kesehatan, jarak ke pusat layanan, dan informasi dari media. Dukungan suami sangat penting dalam pemilihan kontrasepsi bagi wanita yang sudah menikah. Dukungan dari tenaga kesehatan juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam layanan KB menurut teori Bertrand tahun 1980. Keberhasilan program keluarga berencana tidak hanya

bergantung pada partisipasi akseptor KB, tetapi juga melibatkan peran aktif tenaga kesehatan.

1.6.6 Kerangka Pikir Teoritis

Identifikasi Masalah:

1. Adanya gap antara target capaian yang dijanjikan di dalam Perjanjian Kinerja DP2PAP2KB dengan realisasi Penggunaan MKJP Tahun 2023.
2. Rendahnya peserta KB yang memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) jika dibandingkan dengan pemakaian jenis Kontrasepsi non Jangka Panjang.
3. Sedikitnya jumlah peserta KB Pria (MOP).



Rumusan Masalah:

1. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2PAP2KB) Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)?

Menurut J. David Hunger dan Thomas Wheelen (2003:4-5), Manajemen strategis mencakup serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Proses ini melibatkan beberapa langkah;

1. pengamatan lingkungan
2. perumusan strategi,
3. implementasi strategi,
4. serta evaluasi dan pengendalian.

Menurut Rumelt (1997) dalam Tauiqurokhman (2016), Cara mengidentifikasi empat tolok ukur yang digunakan untuk menguji baik atau tidaknya suatu strategi, yaitu:

1. Konsistensi
2. Kesesuaian
3. Keunggulan
4. Kelayakan



Kesimpulan



Hasil

1.7 Operasionalisasi Konsep

Strategi DP2PAP2KB dalam meningkatkan penggunaan MKJP adalah upaya yang melibatkan proses perumusan, perencanaan, implementasi, serta evaluasi yang didasarkan pada analisis faktor internal dan eksternal. Berikut adalah konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

1.7.1 Lingkungan Internal dan Eksternal DP2PAP2KB dalam Pelaksanaan Program MKJP

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal mencakup analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang terkait dengan visi dan misi organisasi, SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana yang tersedia.

- a. Visi dan Misi Organisasi; Keberhasilan program MKJP dapat diukur dari keselarasan antara visi dan misi DP2PAP2KB dengan visi dan misi pemerintah, yang tercermin dalam dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Sumber Daya Manusia; Kualitas dan kuantitas SDM sangat memengaruhi pencapaian tujuan program MKJP. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai hal ini meliputi:
 - a. Jumlah dan kualitas staf yang terlibat dalam pelaksanaan program MKJP.

- b. Keahlian dan kompetensi penyuluh dalam memberikan layanan MKJP.
- c. Anggaran; Keberhasilan pengelolaan anggaran dapat dilihat dari sejauh mana alokasi dana sesuai dengan kebutuhan operasional dan pencapaian tujuan program.
- d. Sarana dan Prasarana; Fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan MKJP dan distribusi alat kontrasepsi harus memadai. Indikator yang dievaluasi meliputi:
 - a. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang memadai di daerah.
 - b. Kelengkapan fasilitas untuk pemeriksaan dan penyuluhan terkait MKJP.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal mencakup analisis terhadap peluang dan ancaman yang datang dari kondisi sosial budaya, ekonomi, teknologi, keterlibatan *stakeholders*, dan partisipasi masyarakat.

- a. Kondisi Sosial Budaya; Pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang kontrasepsi jangka panjang sangat penting untuk keberhasilan program. Salah satu indikator yang digunakan adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dan penerimaan terhadap MKJP.

- b. Kondisi Ekonomi; Kebijakan pembiayaan atau subsidi yang disediakan oleh pemerintah dapat menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dapat mengakses MKJP tanpa hambatan finansial.
- c. Teknologi; Akses informasi tentang MKJP dapat membantu memperluas jangkauan program dan mempermudah proses pelaksanaannya.
- d. Keterlibatan *Stakeholders*; Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor kesehatan, sangat penting dalam mendukung pelaksanaan MKJP.
- e. Partisipasi Masyarakat; Partisipasi aktif masyarakat dalam program MKJP dapat dilihat dari kesediaan masyarakat untuk mengikuti penyuluhan, menggunakan metode kontrasepsi, serta mendukung keberlanjutan program.

1.7.2 Analisis Isu Strategis

Dalam menganalisis isu strategis, peneliti menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk menyusun dan merencanakan strategi yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Melalui analisis ini, dapat ditemukan strategi mana yang perlu ditingkatkan dan diprioritaskan untuk mencapai tujuan program MKJP.

Setelah isu-isu strategis diidentifikasi, masing-masing strategi akan dievaluasi menggunakan Uji Litmus untuk menguji efektivitasnya. Uji ini membantu menentukan strategi mana yang paling tepat dan dapat diterapkan dengan sukses dalam konteks pelaksanaan program MKJP.

1.8 Argumen Penelitian

Pada penelitian ini mengenai strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (DP2PAP2KB) Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan penggunaan MKJP dilatarbelakangi oleh fakta bahwa berdasarkan RENSTRA Tahun 2024-2026 DP2PAP2KB terdapat tantangan dalam penerapan metode MKJP di Kabupaten Banyuasin diantaranya masih rendahnya peserta KB yang memakai MKJP jika dibandingkan dengan pemakaian jenis Kontrasepsi non Jangka Panjang, masih sedikitnya jumlah peserta KB Pria (MOP) dalam penggunaan metode MKJP, tinggi kekhawatiran masyarakat akan efek samping alat dan obat kontrasepsi, dan masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Program KB secara keseluruhan. Lokus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (DP2PAP2KB) Kabupaten Banyuasin.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang di mana mendeskripsikan suatu fenomena dengan rinci dan jelas. Studi deskriptif kualitatif ini bermaksud untuk memaparkan, mendeskripsikan, serta memberikan wawasan mendalam tentang penggunaan MKJP di Kabupaten Banyuasin. Peneliti akan memaparkan temuan yang diperoleh di lokasi penelitian dan membandingkannya dengan data dari jurnal, berita, dan situs data. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan dan menggambarkan temuan tersebut menggunakan tulisan, gambar, data, dan deskripsi verbal. Peneliti meneliti aspek internal dan eksternal, lalu mengidentifikasi masalah strategis dengan menggunakan analisis SWOT. Setelah itu, peneliti mengevaluasi strategi melalui Uji Tes Litmus dan merumuskan strategi untuk menangani masalah-masalah yang ada.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini ialah DP2PAP2KB Kabupaten Banyuasin. Hal ini dikarenakan fokus penelitian ini mengenai strategi yang digunakan oleh DP2PAP2KB Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan MKJP.

1.9.3 Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), Subjek penelitian merujuk pada individu, kelompok, atau objek yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Ia menyatakan bahwa subjek penelitian adalah sumber data utama yang memberikan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Subjek dalam penelitian ini ialah Kepala Dinas, Kepala Bidang Keluarga Berencana beserta pegawai Dinas DP2PAP2KB Kabupaten Banyuasin.

Tabel 1.5 Subjek Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas P2PAP2KB	1 orang
2	Kepala Bidang Keluarga Berencana DP2PAP2KB	1 orang
3	Koordinator Lapangan Keluarga Berencana	2 orang
4	Penyuluh Keluarga Berencana	2 orang

Sumber: diolah oleh peneliti (2024).

1.9.4 Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini memanfaatkan tipe data deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), data kualitatif adalah data yang berbentuk transkrip, gambar, dan non-numerik. Data ini dihasilkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lain yang memberikan informasi rinci dan mendalam.

1.9.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer adalah data yang terhimpun langsung dari peneliti berasal sumber aslinya. Data primer yang dihasilkan pada penelitian ini berasal dari perolehan *interview* yang dijalankan terhadap Kepala Dinas P2PAP2KB, Kepala Bidang Keluarga Berencana DP2PAP2KB, dan Staf DP2PAP2KB.

b. Sumber data sekunder adalah data yang sudah dihimpun dari pihak luar atau lembaga sebelumnya. Pada penelitian ini, data sekunder didapatkan dari banyak referensi, seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, berita, serta situs yang menyediakan informasi resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Siperindu BKKBN, dan lainnya.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data. Di antaranya;

1. Wawancara, menurut Sugiyono (2018), Wawancara adalah sebuah dialog antara peneliti dan informan bertukar data dan gagasan dengan diskusi mengenai topik yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, wawancara ini akan dilakukan dengan Kepala Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin, Kepala Bidang DP2PAP2KB, beserta Staf DP2PAP2KB.

2. Observasi, menurut Sugiyono (2018), menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti dapat mengamati langsung perilaku dan memahami makna di balik perilaku tersebut secara langsung di lokasi penelitian. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat secara nyata apa yang terjadi dan mengonfirmasi kebenaran dari topik yang sedang diteliti. Peneliti melakukan pengamatan langsung dan meninjau langsung ke DP2PAP2KB Kabupaten Banyuasin.

3. Dokumentasi, menurut Sugiyono (2018), adalah proses pengumpulan dokumen yang berisi catatan mengenai kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Berkas ini ini bisa dalam bentuk teks, seperti peraturan, kebijakan, laporan kegiatan, atau data yang berhubungan dengan penelitian. Pada konteks tersebut, dokumentasi yang dimaksud adalah data sekunder yang diperoleh dari DP2PAP2KB Kabupaten Banyuasin.

Selain itu, penelitian ini juga dilaksanakan dengan *literature review* terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2020), terdapat tiga tahap utama dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*):

Tahap pertama adalah reduksi data, yang mencakup pengurangan, penyederhanaan, dan pemilihan data yang relevan dari sumber data yang sudah dikumpulkan. Maksud dari tahap ini ialah agar menciptakan dataset yang lebih terfokus dan terkelola. Reduksi data membantu peneliti untuk mengatasi kompleksitas data kualitatif dan mempersiapkan data untuk tahap analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*):

Peneliti mengorganisasi data yang sudah diurutkan dan direduksi dalam bentuk yang lebih terstruktur. Hal ini dapat mencakup penggunaan teknik seperti tabel, diagram, atau matriks. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memberikan pemahaman visual tentang hubungan antara konsep-konsep atau tema yang muncul dari data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*):

Peneliti menginterpretasikan data yang telah diorganisasi dan mencoba untuk mengidentifikasi pola, tema, atau temuan yang muncul dari data. Proses ini melibatkan analisis kualitatif, yaitu menggabungkan interpretasi dengan konteks penelitian dan teori yang relevan.

Model analisis data pada penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan analisis SWOT dan Uji Litmus untuk menghitung levelkestrategisan suatu isu. Analisis SWOT ialah model analisis keadaan dan kondisi internal dan eksternal secara deskriptif. Analisis SWOT menghasilkan pilihan strategis untuk menentukan faktor keberhasilan dan ancaman kegagalan melalui Matriks SWOT. Matriks SWOT dapat membuat aspek strategis organisasi dengan menyelaraskan kesempatan dan tantangan dengan keunggulan dan kekurangan yang ada.

Uji litmus digunakan untuk menilai seberapa strategis suatu isu melalui serangkaian pertanyaan yang menghasilkan skor. Isu dengan skor tinggi dianggap strategis, sedangkan skor rendah menunjukkan isu operasional. Uji ini berfungsi sebagai alat untuk menyaring dan mengevaluasi tingkat strategis suatu isu. Penilaian dilakukan dengan 13 pertanyaan, masing-masing diberi skor: 1 (operasional), 2 (cukup strategis), atau 3 (sangat strategis). Total skor menentukan kategori: 13–21 (kurang strategis), 22–30 (cukup strategis), 31–39 (sangat strategis).

1.9.8 Kualitas Data

Pengujian kualitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2015:83), triangulasi adalah metode yang menyatukan banyak jenis data dan sumber informasi yang tersedia. Wijaya (2018:120-121) menambahkan bahwa triangulasi data adalah cara untuk

memeriksa data dengan menggunakan banyak sumber, metode, dan jangka yang tidak sama. Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, waktu, dan teknik (Sugiyono, 2019:368-369). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber sebagai metode untuk memastikan keakuratan data dengan menelisik data informasi yang dikumpulkan dari banyak sumber, termasuk *interview*, arsip, dan berkas lainnya. Data akan diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah narasumber yang relevan. Data tersebut kemudian akan dibandingkan untuk menemukan kesamaan. Jika hasilnya menunjukkan kesamaan dan konsistensi, maka data tersebut dianggap memiliki kualitas yang dapat dipercaya.